

PENGARUH BELANJA RUTIN DAN BELANJA MODAL PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Desak Nyoman Yulia Astiti¹
Ni Putu Sri Harta Mimba²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: yulia_desak@yahoo.com/ telp: +6281337344060

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam laporan keuangan. Dewasa ini keefektifan pengalokasian belanja daerah masih dikatakan belum tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan lingkup delapan kabupaten dan satu kota dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013. Sumber data penelitian yaitu berupa data sekunder dari Biro Keuangan Provinsi Bali. Hipotesis diuji dalam penelitian ini dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independensi, belanja rutin dan belanja modal mampu memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 22,3%, sedangkan sisanya 77,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Kata kunci: belanja rutin, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

ABSTRACT

One of the elements that is related to the measurement of financial performance of local governments are expenses areas. Nowadays, the effectiveness of allocation in regional spending tend to be low. This study aims to determine the effect of Routine Expenditure and Capital Expenditure on Local Governments' Financial Performance. The study was conducted in Bali Province with the scope of the eight regencies and one city in the period of five years, from 2009-2013. The resource of this research was the secondary data from the Bureau of Finance in Bali Province. The hypothesis was tested with PLS. Based on the analysis, routine expenditure does not affect the financial performance of local governments and capital expenditures can affect the financial performance of local governments. The independence variable, routine expenditure and capital expenditure can affect the financial performance of local governments by 22.3%, while the remaining 77.7% is influenced by other variables.

Keywords: routine expenditure, capital expenditure, the financial performance of local governments

PENDAHULUAN

Reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 telah menyebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Aspek pemerintahan merupakan salah satu aspek utama terkena dampak dari reformasi. Otonomi yang lebih luas dan nyata untuk kepada masing-masing daerah adalah isu terpenting dari aspek ini.

Sebagaimana tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah itu sendiri yaitu hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom agar mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan agenda baru dalam pemerintahan Negara Indonesia dan terhitung mulai 1 Januari 2001.

Salah satu perwujudan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal yaitu adanya otonomi daerah. Perwujudan dari desentralisasi yaitu pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak, melakukan pembelanjaan, serta diberikannya bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk transfer. Yusuf (2014) menjelaskan dengan adanya desentralisasi fiskal, dalam hal menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, pemerintah daerah diberikan hak untuk meningkatkan pendapatannya dan mengalokasikan dana yang dimiliki dengan baik. Selain dapat menggali sumber keuangan yang berpotensi di daerahnya, manfaat lain dari desentralisasi fiskal yaitu pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan sumber keuangan ke belanja-belanja daerah dengan menyesuaikan pada keperluan masyarakat di daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada di daerahnya. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk

informasi akuntansi yang diberikan oleh manajemen sektor publik sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat tentang pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:159). Pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. Pernyataan ini sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2001) selain kemampuan keuangan daerah, salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan daerah ketika menjalankan otonomi daerah yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja merupakan prestasi yang diraih dari kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi dari organisasi tersebut. Oleh karena itu prestasi yang diperoleh dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah selama satu periode anggaran yang terdiri dari anggaran dan realisasi dengan menggunakan indikator keuangan dan telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan bersama atau berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan merupakan pengertian dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah, pemerintah daerah secara tidak langsung dituntut untuk terus melakukan penggalian pada sumber-sumber asli yang dimiliki daerah, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sularso dan Restianto (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila pemerintah mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip *value for money*, keadilan, terbuka, akuntabilitas, serta partisipasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan ketika pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku dan juga aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Mardiasmo (2009:121) mengemukakan terdapat tiga tujuan mengapa perlu dilaksanakannya pengukuran pada kinerja pemerintah yaitu untuk membantu mengoreksi kinerja pemerintah, ukuran kinerja pemerintah bertujuan dalam mengalokasikan sumber daya daerah dan perumusan keputusan, serta pengukuran kinerja pemerintah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mengoreksi hubungan antar lembaga. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana cara pemerintah mengalokasikan dana yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah.

Hingga saat ini pengalokasian dana masih dikatakan belum tepat sasaran. Menurut I Ketut Wirya (dikutip dari Koran balipost) realisasi belanja sampai dengan bulan Mei 2013 mencapai 28,46% dari dana yang tersedia atau sebesar Rp 479 T, didominasi oleh subsidi energi, belanja pegawai dan dana-dana transfer ke daerah. Selain itu juga hasil audit BPK tahun 2006-2011 menunjukkan laporan keuangan Provinsi Bali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sembilan kabupaten/kota lingkup Provinsi Bali juga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sayangnya prestasi ini tidak diikuti oleh Kabupaten

Tabanan yang meraih opini disclaimer. Oleh karena itu, kabupaten/kota dan juga Provinsi Bali harus segera berupaya lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD dan aset-aset daerah, sehingga di tahun-tahun mendatang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah membuat anggaran pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah otonom masing-masing diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun APBD. Salah satu provinsi di Indonesia yang terkena imbas dari diterapkannya otonomi daerah yaitu Provinsi Bali. Menurut Wahono (2012) rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang didiskusikan dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan pengertian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam merumuskan rencana anggaran daerah tidak serta merta memiliki jalan yang baik. Sering adanya perbedaan prinsip dan didasari perbedaan kepentingan politis antara pihak eksekutif dan legislatif ketika menyusun anggaran daerah. Teori keagenan dapat dipraktikkan pada organisasi sektor publik. Dimana teori tersebut dikemukakan oleh Lane (2003) dalam Halim dan Abdullah (2006). Teori keagenan menjelaskan suatu hubungan dikategorikan sebagai hubungan keagenan yaitu ditandai dengan adanya sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah sebagai pihak yang menjalankan perintah yang diberikan oleh agen untuk

mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan menjelaskan legislatif dalam organisasi sektor publik diproksikan oleh masyarakat yaitu memiliki peran sebagai prinsipal (pihak yang memberikan wewenang), sedangkan agen yang diproksikan oleh pihak eksekutif (sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perintah dari prinsipal).

Dalam merancang APBD untuk jangka waktu satu tahun, eksekutif diberikan wewenang oleh legislatif dan kemudian secara bersama-sama mengesahkannya. Menurut Smith & Bertozzi (1998) dalam Suryarini (2012) eksekutif atau agen yang memiliki peran sebagai pihak yang memberikan saran pada anggaran dan juga sebagai pelaksana serta pemakai dari anggaran tersebut mengusahakan untuk mengoptimalkan total anggaran. Sedikitnya jumlah informasi yang dimiliki pihak prinsipal mengakibatkan pihak prinsipal mengalami kesulitan dalam memonitor dan mengevaluasi apakah efektif tindakan yang dilakukan oleh agen.

Pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari empat jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan hal ini berpedoman Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu bagian yang terpenting dan utama dalam Laporan Realisasi Anggaran yakni belanja daerah. Menurut Fathiyah (2012) perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting untuk dilakukan, hal ini dikarenakan belanja daerah sangat rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik berkepentingan untuk

mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

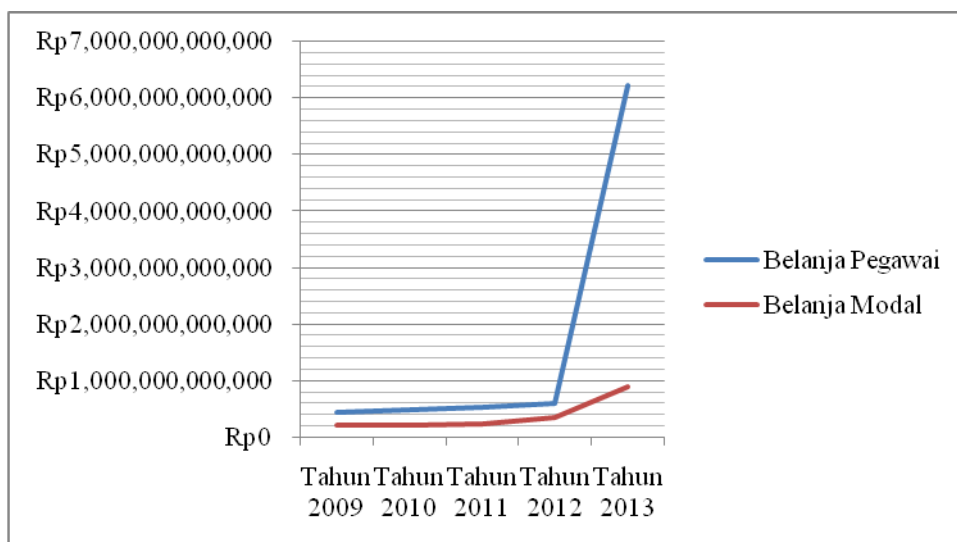
Seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang berakibat dapat menurunkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang berlaku dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pengembalian yang sama lagi oleh pemerintah merupakan pengertian dari belanja daerah. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga, dan transfer.

Mardiasmo (2009:66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja modal. Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintah sehari-hari sedangkan belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Jenis-jenis belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

Menurut Fathiyah (2012) peningkatan jumlah belanja cenderung sering mengalami peningkatan. Perubahan tersebut terjadi karena menyesuaikan keadaan

pada faktor-faktor ekonomi, adanya perubahan kurs rupiah, serta menyesuaikan dengan adanya inflasi. Pengalokasian belanja daerah untuk di masing-masing daerah berbeda-beda. Pengalokasian tersebut disesuaikan dengan pendapatan daerah dan kebutuhan masing-masing daerah.

Badrudin (2011) menjelaskan dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai keberhasilan untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah melaksanakan pengeluaran belanja daerah yaitu berupa belanja rutin maupun belanja modal. Namun dewasa ini keefektifan pengalokasian belanja daerah masih dikatakan belum tepat sasaran. Tidak efektifnya pengalokasian tersebut ditunjukkan oleh penurunan alokasi belanja modal dan sebaliknya terjadinya peningkatan alokasi salah satu jenis belanja rutin yaitu belanja pegawai. Hal ini juga dapat dilihat pada Laporan Realisasi APBD di Provinsi Bali. Laporan Realisasi APBD di Provinsi Bali selama lima tahun yaitu dalam rentang waktu tahun 2009-2013 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Laporan Realisasi APBD Belanja Pegawai dan Belanja Modal Provinsi Bali Tahun 2009-2013

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali (data diolah, tahun 2015)

Jika dilihat pada grafik Laporan Realisasi APBD Provinsi Bali pada tahun 2009-2013, pengeluaran pemerintah lebih besar dikeluarkan untuk keperluan pembiayaan belanja pegawai daripada untuk pembiayaan belanja modal. Selain itu, data yang diperoleh pada Biro Keuangan Provinsi Bali, pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pengalokasian belanja pegawai, namun tidak diiringi pula dengan peningkatan alokasi belanja modal.

Swandewi (2014) mengemukakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang lebih luas ketika menjalankan kewajibannya termasuk dalam mengelola keuangan daerah akibat dari diterapkannya otonomi daerah. Analisis rasio pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, terbuka, jujur, demokratis, dan akuntabel, hal ini dipaparkan oleh Halim (2007:232).

Halim dan Muhammad (2014:105) menjelaskan untuk mengetahui kesuksesan suatu organisasi pemerintahan dalam mengolah potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah berdasarkan pada rencana awal yang telah ditetapkan, dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik terdapat beberapa rasio pengukuran, yakni rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Sularso dan Restianto (2011) menjelaskan bahwa selain dari rasio yang telah dijelaskan sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat pula diukur dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2009), kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran yaitu dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Penyerapan anggaran yang baik nantinya dapat mengartikan kinerja keuangan pemerintah meningkat pula. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengatur pengeluarannya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan (Putri, 2014).

Keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk lebih besar mengalokasikan dana dalam rangka membiayai kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut belanja modal, menandakan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan daerah dengan baik. Halim (2007:236) menyatakan bahwa apabila proporsi belanja modal lebih besar daripada proporsi belanja rutin maka dapat menyebabkan terjadinya keserasian alokasi belanja daerah. Saragih (2003) juga memaparkan pertumbuhan ekonomi daerah pun akan terus meningkat apabila pemerintah daerah dapat menetapkan anggaran belanja modal lebih besar dari belanja rutin.

Pengujian Zebua (2014) mendapatkan hasil yaitu belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa belanja rutin belum sepenuhnya dapat berkontribusi dalam upaya

meningkatkan pembangunan ekonomi. Puspitasari,dkk. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nugroho (2012) dengan hasil yaitu belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Hasil yang diperoleh penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2012) bahwa belanja pegawai negeri sipil, belanja pegawai honorer, belanja barang dan jasa, serta belanja modal memiliki pengaruh pada capaian kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Patriati (2010) memperoleh hasil bahwa belanja rutin berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini juga diperkuat seperti hasil yang didapat oleh Fathiyah (2012) yang menjelaskan bahwa hasil analisis rasio belanja per fungsi menunjukkan Pemerintah Provinsi Jambi sudah melaksanakan prioritas belanja dengan mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum.

Belanja APBD dapat dikatakan belum dialokasikan secara tepat sehingga tidak terjadi keserasian anggaran dengan hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Selain itu juga dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Bali yang lebih banyak mengalokasikan dana pada belanja rutin daripada untuk belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni menggunakan belanja rutin dan belanja modal sebagai variabel independen untuk mengetahui kinerja keuangan

pemerintah daerah Provinsi Bali. Untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, diukur dengan menggunakan dua pengukuran yaitu rasio pertumbuhan dan serapan anggaran.

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: 1) Apakah Belanja Rutin berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ? serta 2) Apakah Belanja Modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Rutin pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta 2) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori dan menambah pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi untuk Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja keuangannya serta dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja daerah yaitu dengan mengalokasikan lebih besar pada belanja modal.

Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintah sehari-hari, namun tidak dapat meningkatkan aset untuk

pemerintah. Belanja rutin pada dasarnya berlaku untuk satu tahun periode anggaran. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah melakukan pengeluaran belanja rutin. Apabila pemerintah baik dalam mengelola pembelanjaan untuk pemerintah daerah maka dapat diartikan pemerintah semakin baik memberikan pelayanan kepada publik. *Value for money* dapat tercipta dengan baik dengan dilakukan pengelolaan pembelanjaan yang tepat dan penilaian kinerja akan mengalami peningkatan pula. Hal ini merujuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Patriati (2010) bahwa belanja rutin berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₁ : Belanja Rutin berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2009:67). Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan jika sumber yang dihasilkan berlimpah maka nantinya hasil yang didapat pun juga akan melimpah pula.

Banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka diharapkan kemandirian daerah juga akan mengalami peningkatan terutama untuk membiayai kegiatannya dalam hal keuangan. Puspitasari,dkk., (2015) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) bahwa belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Belanja Modal berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

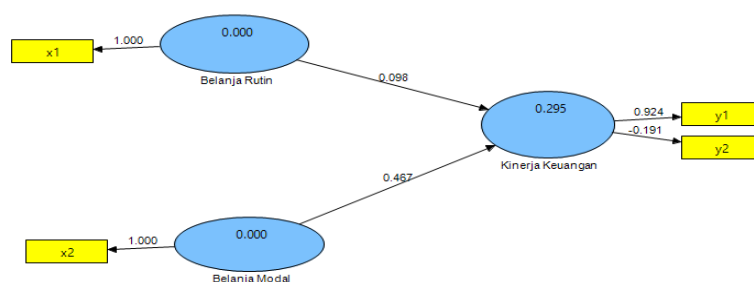
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Lokasi dari penelitian ini yaitu Biro Keuangan Provinsi Bali. Obyek yang diteliti pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2009-2013. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali seperti Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013. Data kuantitatif dan kualitatif merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2008-2013) adalah data yang digolongkan menjadi data kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dan gambaran umum Provinsi Bali dijadikan sebagai acuan untuk data kualitatif.

Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali tahun 2008-2013 merupakan populasi dalam penelitian ini. Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota se-Provinsi Bali tahun 2008-2013 yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan kurun waktu 5 tahun (2009-2013) merupakan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi non partisipan merupakan metode pengumpulan data. Pendekatan *Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian model pengukuran (*outer model*) dan pengujian model struktural (*inner model*) merupakan tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam pengujian model pengukuran terdapat dua tahapan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas dapat dibagi menjadi dua yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data *time series*, data diperoleh dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9 kabupaten/kota x 5 tahun = 45 amatan. Berikut ini hasil pengujian validitas konstruk dengan menggunakan SmartPLS.



Gambar 2. Tampilan Hasil *PLS Algorithm Model 1*

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1.
Outer Loadings Model 1

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)
x1 <- Belanja Rutin	1.000	1.000	0.000	
x2 <- Belanja Modal	1.000	1.000	0.000	
y1 <- Kinerja Keuangan	0.924	0.871	0.212	0.212
y2 <- Kinerja Keuangan	-0.191	-0.186	0.222	0.222

Sumber: Data diolah, 2015

Untuk melihat hubungan antara indikator dengan kosntruknya pada model dapat dilihat dari hasil *construct validity*. Hubungan diantara variabel dapat dikatakan reliable apabila bernilai diatas 0.7. Akan tetapi pada penelitian tahap pengembangan skala, nilai *loading factor* berada diatas 0.5 hingga 0.6 masih diperbolehkan.

Merujuk dari hasil Tabel 1 *outer loadings* model 1 di atas, di peroleh hasil indikator Y_2 atau dalam penelitian ini adalah Serapan Anggaran mempunyai *loading factor* negatif dan < 0.5 , oleh karena itu dieliminasi dari model. Setelah indikator Y_2 (Serapan Anggaran) dieliminasi dari model, maka model kita lakukan uji kembali.

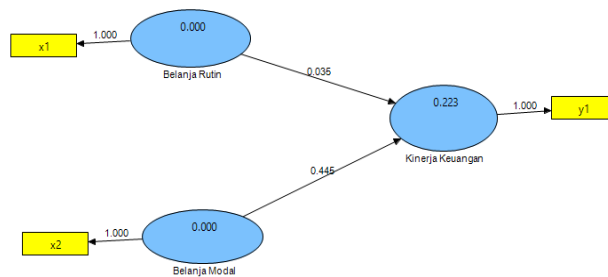
Tabel 2.
Outer Loadings Model 2

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)
x1 <- Belanja Rutin	1.000	1.000	1.000
x2 <- Belanja Modal	1.000	1.000	1.000
y1 <- Kinerja Keuangan	1.000	1.000	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Setelah dilakukannya pengujian kembali ternyata memperoleh hasil semua *loading factor* memberikan hasil lebih dari 0.5 dan juga signifikan. Dari hasil

yang diperoleh dari Tabel 2 maka dapat disimpulkan konstruk memenuhi kriteria *construct validity*. Hasil yang diperoleh oleh Tabel 2 juga dapat dipertegas dengan tampilan gambar berikut ini.



Gambar 3. Tampilan Hasil *PLS Algorithm Model 2*

Sumber: Data diolah, 2015

Untuk dapat mengetahui suatu konstruk apakah memenuhi kriteria *convergen validity* atau tidak yaitu dengan melihat perolehan dari besar angka *average varian extracted (AVE)* dan *communality*. Masing-masing perolehan hasil harus memiliki nilai lebih dari 0.5. Tabel 3 berikut ini menjelaskan semua *AVE* dan *Communality* masing-masing variabel mendapatkan hasil lebih dari 0.5. Dari hasil tersebut dapat dikatakan semua konstruk memiliki nilai *convergent validity* yang sesuai dengan kriteria.

Tabel 3.
AVE dan Communality

<i>Construct</i>	<i>AVE</i>	<i>Communality</i>
Belanja Rutin	1.000	1.000
Belanja Modal	1.000	1.000
Kinerja Keuangan	1.000	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 4.
Cross Loadings

	Belanja Modal	Belanja Rutin	Kinerja Keuangan
X ₁	0.745	1.000	0.367
X ₂	1.000	0.745	0.471
Y ₁	0.471	0.367	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Untuk dapat mengetahui suatu konstruk memenuhi kriteria *discriminant validity* yaitu dengan melihat perolehan dari besar angka *cross loadings* antara indikator dengan konstruknya. Kriteria agar semua konstruk dapat dikatakan *discriminant validity* yaitu nilai *cross loadings* masing-masing konstruk harus lebih besar dari 0.7. Tabel 4 menunjukkan hasil *cross loadings* semua konstruk lebih dari 0.7. Hal ini berarti semua konstruk memenuhi kriteria *discriminant validity*. Terdapat cara lain untuk mengetahui *discriminant validity* suatu konstruk. Salah satunya yaitu dengan melakukan perbandingan antara akar kuadrat dari *average variance extracted* (\sqrt{AVE}) dari masing-masing konstruk dengan hubungan antara konstruk satu dengan konstruk lainnya pada model. Apabila akar AVE dari masing-masing konstruk lebih tinggi daripada antara hubungan konstruk dan konstruk lainnya maka dapat disimpulkan model memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Tabel 5.
Latent Variable Correlations

	Belanja Modal	Belanja Rutin
Belanja Modal	1.000	
Belanja Rutin	0.745	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 6.
AVE dan Akar AVE

	AVE	Akar AVE
Belanja Modal	1.000	1
Belanja Rutin	1.000	1

Sumber: Data diolah, 2015

Dari Tabel 5 dan Tabel 6 diperoleh hasil bahwa akar AVE konstruksi belanja modal bernilai $1 (\sqrt{1})$ lebih besar daripada hubungan antara konstruksi belanja rutin dengan belanja modal yang bernilai yaitu 0.75. Begitu juga dengan dengan akar AVE konstruk belanja rutin sebesar $1 (\sqrt{1})$ lebih besar daripada hubungan antara konstruksi belanja rutin dengan belanja modal yang bernilai yaitu 0.75. Dari hasil yang diperoleh tersebut maka dapat disimpulkan semua konstruk dalam model sesuai dengan kriteria *discriminant validity*.

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009:62) mengatakan bahwa reliabelnya suatu konstruk apabila nilai *composite reliability* masing-masing konstruk lebih dari 0.70. Tabel 7 di bawah ini dapat menjelaskan nilai *composite reliability* dari masing-masing konstruk pada model. Dari perolehan nilai *composite reliability* yang ditunjukkan pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa nilai masing-masing konstruk bernilai lebih dari 0.7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk telah sesuai dengan kriteria reliabel.

Selain dengan melihat nilai dari *composite reliability*, uji reliabilitas juga dapat diperoleh dengan melihat hasil dari *cronbach's alpha*. Suatu model dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* yaitu lebih besar dari 0.6. Dilihat dari hasil *cronbach's alpha* pada Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memenuhi kriteria reliabel yaitu dengan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.6.

Tabel 7.
Composite Reliability

<i>Construct</i>	<i>Composite Reliability</i>
Belanja Rutin	1.000
Belanja Modal	1.000
Kinerja Keuangan	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 8.
Cronbach's Alpha

<i>Construct</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Belanja Rutin	1.000
Belanja Modal	1.000
Kinerja Keuangan	1.000

Sumber: Data diolah, 2015

Untuk mengetahui hubungan antara masing-masing konstruk, nilai signifikansi, serta *R-square* dari model penelitian, maka perlu dilakukannya pengujian *inner model* atau model struktural. Pengujian yang dilakukan pada model struktural bertujuan untuk mengetahui nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Dilihat dari Tabel 9 model pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh hasil *R-square* sebesar 0.223 yang jika diartikan bahwa variabilitas konstruk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Belanja Rutin dan Belanja Modal sebesar 22,3 % sedangkan 77,7 % dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model yang diteliti.

Tabel 9.
R-square

	<i>R-Square</i>
Kinerja Keuangan	0.223

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 10.
PathhCoefficientss(Mean, STDEV, T-Values)

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistics (O/STERR)</i>
Belanja Rutin -> Kinerja Keuangan	0.035	0.0394	0.104	0.104	0.337
Belanja Modal -> Kinerja Keuangan	0.445	0.433	0.142	0.142	3.130

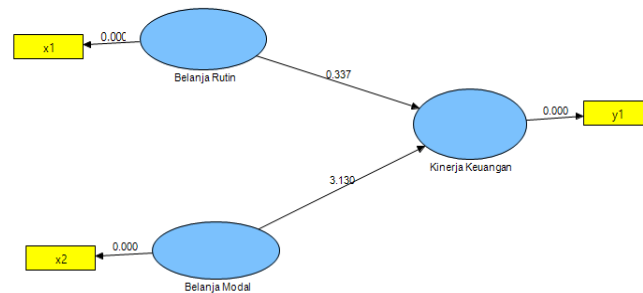
Sumber: Data diolah, 2015

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen maka peneliti menggunakan uji hipotesis (uji t). Dalam penelitian ini variabel independen yang diuji secara individual terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah Belanja Rutin (X_1) dan Belanja Modal (X_2). Adapun skor atau nilai t statistik yaitu t tabel signifikansi 5% = 1.96. Jika t statistik > 1.96, maka hipotesis alternatif diterima dan jika t statistik < 1.96, maka hipotesis alternatif ditolak.

Hasil uji pengaruh belanja rutin (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh t statistik sebesar 0.337 lebih kecil dari t tabel signifikansi 5% = 1.96. Hal ini berarti bahwa belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi belanja rutin (X_1) pada Tabel 10 menunjukkan adanya pengaruh positif belanja rutin pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian koefisien determinasi dan t statistik menyatakan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain hipotesis H_1 ditolak.

Hasil uji pengaruh belanja modal (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh t statistik sebesar 3.13 lebih besar dari t tabel signifikansi 5% = 1.96. Hal ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi belanja modal (X_2) pada Tabel 10 menunjukkan adanya pengaruh positif belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian koefisien determinasi dan t statistik menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain hipotesis H_2 diterima.

Hasil t statistik dapat dijelaskan pada gambar hasil *bootstrapping* berikut ini.



Gambar 4. Tampilan Hasil *Bootstrapping* Model 2

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih banyak mengalokasikan belanja daerah untuk membiayai belanja pegawai yang merupakan salah jenis dari belanja rutin. Pemerintah rata-rata mengalokasikan belanja pegawai diatas 80% dari total belanja rutin. Belanja pegawai merupakan belanja yang tidak memiliki pengaruh langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2012) bahwa belanja pegawai negeri sipil sebagai salah satu jenis belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji hipotesis H_2 diterima yaitu belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja

modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan jika sumber yang dihasilkan berlimpah maka nantinya hasil yang didapat pun juga akan melimpah pula. Selain untuk mengembangkan infrastruktur industri, belanja modal juga ditujukan memberikan layanan kepada masyarakat yaitu salah satunya melalui infrastruktur jasa.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa belanja modal memiliki peran dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali. Hasil temuan ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, dkk. (2015), Priyo (2006) dan Nugroho (2012) bahwa terdapat hubungan yang signifikan di antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja rutin yang tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun dalam hal ini pemerintah lebih banyak mengalokasikan belanja daerah yaitu pada belanja pegawai sebagai salah satu jenis belanja rutin sehingga tidak tepat sasaran. Belanja pegawai merupakan salah satu jenis belanja rutin yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak pada belanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Apabila sumber-sumber keuangan meningkat maka dapat dikatakan pemerintah telah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah sebaiknya menurunkan alokasi belanja rutin khususnya alokasi belanja pegawai dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini dikarenakan pemerintah rata-rata mengalokasikan belanja pegawai diatas 80% dari total belanja rutin. Pemerintah daerah diharapkan juga dapat mengalokasikan belanja dibidang pendidikan dan kesehatan di atas presentase minimal yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 yaitu masing-masing sebesar 20% dan 10%.

Hasil *R square* sebesar 22,3% menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti kebijakan pemerintah dan kompetensi aparatur. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio keuangan lain untuk

mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu seperti rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Diharapkan pula agar pemerintah lebih baik lagi dalam mengalokasikan belanja daerah terutama pada belanja modal agar nantinya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Ahmad, Abd.R., Alan Farley & Moonsamy Naidoo. 2012. Analysis of Government-University Relationship from the Perspective of Agency Theory. *Journal of Education and Practice*. 3(6).
- Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, pp: 93-108.
- Aristovnik, A. 2012. Fiscal decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective. MPRA Paper No. 39316, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Badrudin, Rudy. 2011. Effect of Fiscal Decentralization On Capital Expenditure, Growth, and, Welfare. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3), pp: 211-223.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. Fiscal Decentralisation and Economic Growth:A Bayesian Model Averaging Approach. *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Faridi, M.Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), pp: 1-33.
- Fathiyah. 2012. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura*. 12 (3).
- Govinda Rao, M. 2003. Fiscal Decentralization In China And India: A Comparative Perpspective. *Asia-Pacific Development Journal*. 10(1).
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), pp: 53-64.
- Hayek, F.A. 1945. The Use of Knowledge In Society. *The American Economic Review*, 35(4), pp: 519-530.
- I Ketut Wirya, 2013, *Menggapai Opini WTP Prestasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah*, Balipost, 18 Juni 2013.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360.
- Jogiyanto, H.M. dan Abdillah, W. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (partial least square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Jumadi., M. Pudjiharjo., Ghozali Maski., Moh. Khusaini. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science*.13(1), pp: 01-07.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*, New York: McGraw.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- Patriati, Ratri. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri, dkk. 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng). 3 (1).
- Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Steven, J., dan McGowen, R. 1983. Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective. *Policy Study Rivew*. 2(3), pp: 33-51.
- Suryarini, Trisni. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), pp: 207-216.
- Susilowati, Meviana. 2012. Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD di Boyolali).
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Tirtosuharto, Darius. 2010. The Impact Of Fiscal Decentralization And State Allocative Efficiency On Regional Grahrowth In Indonesia. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2(2).
- Wahono, Joko. 2012. Analisis Pengelolaan Belanja Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008-2011.
- Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.